

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, J. (2005) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2009) *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.

Asshiddiqie, J. (2012) *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2019) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiarjo, M. (2005) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta.

Friedman, L.M. (2001) *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hadi, S. (2020) *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit.

Hakim, L. (2009) *Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Ringkasan Disertasi. Malang: PDIH FH Universitas Brawijaya.

Isra, S. and Fahmi, K. (2019) *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Martosoewignjo, S. (1986) *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.

Marzuki, P.M. (2014) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2008) *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

JURNAL

Ali, M.M. et al. (2012) 'Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif', *Jurnal Konstitusi*, 9(1).

Bisariyadi (2016) 'Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang', *Jurnal Konstitusi*, 13(1).

Cintanesa, E., Arianto, B. and Charin, R.O.P. (2025) 'Analisis Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Pemilihan Umum di Kota Tanjungpinang Tahun 2024, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum', *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2 (1).

Dramanda, W. (2016) 'Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 11(4).

Fadjar, A.M. (2011) 'Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif', makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas, Mahkamah Konstitusi, 23 Maret.

Limbong, J.H. (2021) 'Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020', *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4 (2).

Mayo, H.B. (2009) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003', *Jurnal Konstitusi*, PKK-FH, Universitas Bengkulu, 2 (1).

Miller, R.A. (2004) 'Lords of Democracy: The Judicialization of "Pure Politics" in the United States and Germany', *Washington & Lee Law Review*, 58 (3).

Nabitatus Sa'adah (2019) 'Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review', *Administrative Law & Governance Journal*, 2(2), Juni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1*. Jakarta, 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PUTUSAN

Bush v. Palm Beach County Canvassing Board, 531 U.S. 70 (2000) (Wells, C.J., dissenting).

Mahkamah Konstitusi (2010) *Pendapat Mahkamah Point [3.24.12.6] Putusan No. 31/201031/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010*.

Mahkamah Konstitusi (2019) *Pendapat Mahkamah Point [3.11] Putusan No. 1/PHPU.PRES/XVI/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Mahkamah Konstitusi (2024) *Pendapat Mahkamah Point [6.2] Putusan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Mahkamah Konstitusi (2024) *Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.*

INTERNET

Applawfirm (2023) *Pelanggaran TSM Pemilu: Kewenangan MK atau Bawaslu?* <https://applawfirm.co.id/artikel/pelanggaran-tsm-pemilu-kewenangan-mk-atau-bawaslu/>.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (2024) *Bawaslu Ungkap 22 Masalah Pemilu Serentak 2024, Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Sorotan.* Available <https://www.akurat.co/politik/1305381944/bawaslu-ungkap-22-masalah-pemilu-serentak-2024-politik-uang-dan-netralitas-asn-jadi-sorotan>.

Hukumonline (2022) 'Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum', *Klinik Hukumonline.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>.

Hukumonline (2025) 'Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih', *Hukumonline.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/penanganan-pelanggaran-pemilihan-umum-pada-tahapan-pemutakhiran-data-pemilih-lt647482fbd4061/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) *Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2024: Lonjakan Anggaran Bansos Menjelang Pilpres.* <https://www.kemenkeu.go.id/berita/anggaran-perlindungan-sosial-tahun-2024-lonjakan-anggaran-bansos-menjelang-pilpres/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) 'Menghitung Biaya Demokrasi', *Media Keuangan.* <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menghitung-biaya-demokrasi>.